



SEJARAH POLITIK INDONESIA DALAM NOVEL *LARASATI*
KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER
Political History of Indonesia in The Novel Larasati
by Pramoedya Ananta Toer

Andri Wicaksono

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia
Bandar Lampung
pos-el: ctx.andrie@gmail.com

Naskah Diterima 16 Juni 2017 –Direvisi Akhir 29 April 2018 —Disetujui 22 Mei 2018
doi.org/10.26499/jentera.v7i1.340

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan realitas sejarah sosial-politik Indonesia dalam novel *Larasati* karya Pramoedya Ananta Toer dengan perspektif *New Historicism*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretif dengan paralel pembacaan antara karya sastra dengan teks sejarah dan desain analisis isi. Gambaran realitas sejarah sosial dan politik Indonesia (periode 1945 hingga 1966) dalam novel *Larasati* dengan perspektif *New Historicism Greenblatt* dianggap efektif untuk mengeksplorasi fenomena teks sastra. Novel ini secara langsung berkaitan dengan manifestasi politik Indonesia yang meliputi (1) struktur ideologi yang digunakan untuk memperkuat kekuatan berbasis negara, dan (2) praktik diskursif, bahasa politik yang mengacu pada konstruksi pengetahuan melalui bahasa yang memberi makna pada segi material dan praktik sosial-politik yang melingkupinya.

Kata kunci: historisisme baru, ideologi, politik, praktik diskursif

Abstract: *This study aimed to describe the nature of social and political history reality of Indonesia in novel Larasati by Pramoedya Ananta Toer through New Historicism perspective. The research used interpretive qualitative method on the readability parallel between literary and historical texts also content analysis design. The description of social and political history reality of Indonesia (period 1945 until 1966) in the novel by using the perspective of New Historicism Greenblatt is considered effective in exploring the phenomenon of literary text. The novel is directly related to the political manifestation of Indonesia that covers (1) ideology structure used to reinforce the state-based power and (2) political discursive practices, the political language that refers to the knowledge construction through the language that gives meaning to the material aspects and social practices.*

Keywords: *new historicism, ideology, political, discursive practices*

How to cite: Wicaksono, Andri. (2018). Sejarah Politik Indonesia dalam Novel *Larasati* Karya Pramoedya Ananta Toer. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 7 (1), 20—35. Doi: <https://doi.org/10.26499/jentera.v7i1.340>

PENDAHULUAN

Perkembangan sastra melalui novel sejarah merupakan cara seorang sastrawan untuk bereskreasi dan menuangkan ide-ide dalam novel dengan tetap mempertahankan unsur sejarah. Dibandingkan sejarawan, sastrawan sebenarnya mempunyai ruang yang lebih leluasa ketika ia hendak menyampaikan refleksi evaluasinya tentang masa lalu. Sebagaimana dikatakan Mahayana (2005: 362—363), secara subjektif, sastrawan dapat memaknai dan menafsirkan fakta atau peristiwa sejarah menurut kepentingannya. Ketika karya sastra dapat dijadikan sebagai rujukan sejarah maka sastra telah membuktikan dirinya sebagai ilmu yang bukan hanya bicara persoalan kreativitas dan rentetan imajinasi, tetapi dapat pula berfungsi sebagai dokumen sejarah.

Bahan karya sastra yang bernilai sejarah biasanya bahannya diambil dari sejarah. Demikian halnya ada perbedaan penggunaan bahasa, antara tulisan sejarah dan karya sastra. Sejarah lebih cenderung menggunakan *referential symbolism* dengan menunjuk secara tegas kepada objek, pikiran, kejadian, dan hubungan-hubungan. Sementara itu, sastra lebih banyak mengandung pesan-pesan subjektif pengarang (Kuntowijoyo, 2006: 173). Karya sastra sejarah merupakan karya sejarah (historiografi). Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa karya sastra mempunyai sumbangsih besar untuk sejarawan dan historiografi. Begitu pun sastra tidak hanya sekadar karya yang bersifat imajinatif dan pribadi, tetapi dapat pula menjadi cerminan atau rekaman budaya suatu perwujudan pikiran tertentu pada saat karya itu dilahirkan (Wicaksono, 2016: 7—21).

Fiksi dapat digunakan sebagai kemudi bagi sejarah. Hal ini dapat dilihat dalam karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya menawarkan sejarah yang dipahaminya dapat dituangkan dalam bentuk fiksi. Namun, sejarah yang dikandung novel-novel Pramoedya adalah sejarah yang selalu bertabrakan dengan sejarah resmi yang dikreasi negara dan penguasa pada zamannya. Ia muncul dan menggagas sejarah dengan versi yang beragam, seperti versi dirinya sendiri, versi penjajahan, versi kemerdekaan, versi Orde Lama, dan versi Orde Baru. Itu semua dipenuhi intrik politik yang melingkupinya. Selanjutnya, menurut Laksana (1997: 111), sastra dijadikan sebagai simbol politik tertentu dan untuk menyuarakan kepentingan tertentu. Inilah yang tidak diterima oleh sebagian sastrawan Indonesia.

Analisis sejarah politik yang telah berkembang dapat menjadi rujukan para peneliti sastra dalam menciptakan karakteristik dan menemukan karyanya sebagai

refleksi gagasan hidupnya untuk dunia. Selain itu pula dapat mencitrakan manusia, menciptakan momen tertentu dalam sejarah Indonesia, serta terdapat arena wacana perlawanan terhadap kolonialisme (Akmal, 2015: 12—23).

Sastra adalah pekerjaan imajinasi, kebenaran di tangan pengarang, dengan perkataan lain bersifat subjektif. Sastra bisa berakhir dengan pertanyaan, sedangkan sejarah harus memberikan informasi selengkap-lengkapya. Bahasa sejarah adalah bahasa yang sederhana dan langsung, persis seperti dalam bahasa sastra modern, tanpa “bunga-bunga bahasa”.

Sastra sebagai suatu seni dapat mengungkap realitas sejarah dalam jenis karyanya, sebut saja fiksi (novel) yang menampilkan fakta sejarah dalam kemasan fiksi. Hal ini bukanlah untuk menunjukkan bahwa sejarah yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang semata palsu, namun dimunculkan dengan tujuan menawarkan berbagai kemungkinan. Dengan itu juga, fiksi dapat menggoyahkan kemapanan fakta sejarah yang selama ini sudah terpatok dalam buku. Dunia yang tertutup oleh akurasi data diobrak-abrik oleh kebebasan seni dalam kemungkinan-kemungkinannya.

Ada hubungan antara karya sastra dan realitas yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa untuk memahami karya sastra diperlukan kajian yang melibatkan hubungan antara karya sastra dengan segi-segi kemasyarakatan. Dengan memahami karya sastra dalam perjuangan bangsa, tidak mustahil seorang pembaca sastra akan menemukan kembali realitas atau representasi sejarah yang digambarkan dalam karya sastra. Dalam hal ini, sejarah, khususnya yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau, tidak hanya ditemukan dalam teks-teks sejarah, tetapi juga dalam karya sastra, misalnya novel.

Novel sejarah lahir sebagai jawaban intelektual dan literer terhadap problematik suatu zaman dengan menggunakan masa lampau sebagai refleksi. Novel sejarah tidak perlu menjadikan tokoh sejarah sebagai tokoh utamanya atau tokoh-tokoh sejarah sebagai tokoh-tokohnya. Realita sejarah muncul dalam novel sejarah, seperti yang diungkap George Lukacs (dalam Kuntowijoyo, 1995: 133): (1) *historical authenticity* (keaslian sejarah), (2) *historical faithfulness* (kesetiaan sejarah), (3) *local colour* (keadaan tempat).

Kajian sejenis dengan pendekatan *New Historicism* dalam fiksi, selain banyak diteliti oleh peneliti dari luar negeri juga telah dikaji oleh peneliti dalam negeri, yaitu

oleh Yoseph Yapi Taum. Taum (2013) memperlihatkan evolusi sastra yang berkaitan erat dengan evolusi sosial-kekuasaan sesuai dengan formasi diskursif yang membentuk praktik diskursif Orde Baru. Ciri yang menonjol dari fase historis Orde Baru itu adalah ada upaya yang terus-menerus dalam mengonstruksi diskursus tentang ancaman dan bahaya laten komunis serta mengabadikan ‘ancaman‘ itu dalam berbagai bentuk sarana ingatan seperti berbagai media komunikasi, pembentukan institusi, pembangunan monumen dan museum, serta hari peringatan. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah pada pemilihan subjek karya sastra dan rangkaian latar yang meliputinya.

Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada realitas sejarah politik Indonesia pada masa perang kemerdekaan yang berkisar antara tahun 1945–1949 dan difokuskan pada novel *Larasati* karya Pramoedya Ananta Toer. Berbagai masalah tersebut akan dianalisis dengan pendekatan *New Historicism Greenblatt*. Kaitannya dalam penyusunan tulisan, subjek pemilihan karya Pramoedya Ananta Toer lebih dikhususkan pada novel yang belum tersentuh oleh perspektif sejarah politik yang melingkupinya.

Karya sastra sebagai simbol verbal, objeknya adalah realitas. Realitas itu dapat berwujud realitas sosial masa kini atau pun realitas yang berupa peristiwa sejarah. Apabila realitas itu berupa peristiwa sejarah seperti dalam novel *Larasati* sebenarnya mengandung maksud untuk (1) menafsirkan realitas sejarah ke dalam bahasa imajiner dengan maksud memahami peristiwa sejarah menurut kemampuan/interpretasi pengarang sendiri, atau (2) menjadi sarana pengarang untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapannya tentang suatu peristiwa sejarah dan dapat dipakai pengarang untuk menolak atau mendukung suatu tafsiran peristiwa sejarah yang sudah mapan. Jika sejarah adalah kenyataan yang terjadi di masa lalu maka perjalanan hidup yang ada pada hari ini dan juga negeri ini dapat tersampaikan kepada khalayak umum di masa kini dan di masa datang. Hal itu dapat diaplikasikan melalui pembelajaran sastra di sekolah, seperti dalam apresiasi fiksi (novel).

Target temuan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini adalah dengan 1) mendeskripsikan struktur ideologi politik, dan 2) mendeskripsikan praktik diskursif politik Indonesia pada masa perang kemerdekaan dalam novel *Larasati* karya Pramoedya Ananta Toer.

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teori, hasil penelitian mengenai sejarah politik Indonesia di masa perang kemerdekaan ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis, pembaca, dan pencinta sastra. Adapun manfaat praktis penelitian ini di antaranya adalah a) mengetahui realitas sejarah politik Indonesia pada masa perang kemerdekaan 1945–1949, b) mengapresiasi realitas sejarah dan politik yang disampaikan dalam novel dengan kajian *New Historicism*, dan c) sebagai referensi agar muncul penelitian baru sehingga dapat menumbuhkan inovasi dalam apresiasi susastra.

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui teori Historisisme Baru (*New Historicism*). Teori *New Historicism* diperkenalkan oleh Stephen Greenblatt yang bertolak belakang dan menentang pandangan *Old Historicism*. Seorang praktisi utamanya, Stephen Greenblatt (dalam Carter, 2009: 133—140) menyatakan bahwa “Historisisme baru tidaklah menempatkan proses kesejarahan sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah dan tak terelakkan, akan tetapi ia cenderung untuk mengetahui batas atau kendala atas intervensi individual ...” Salah satu tokoh terkenal dari *New Historicism* adalah Foucault (dalam Scholz, 1990: 12—28) membuka dengan permasalahan penggunaan berbagai konsep kegilaan atau *madness*. Foucault (2006: xvii) menjelaskan bahwa konsep kegilaan dipahami berbeda-beda oleh masyarakat dari satu periode ke periode lainnya.

New Historicism menyatakan bahwa sejarah merupakan suatu diskursus; cara pandang dan berpikir mengenai dunia. Cara pandang demikian mengasumsikan bahwa sejarah, sastra, ekonomi, politik, agama, dan lainnya, merupakan suatu diskursus, tempat antara satu diskursus dengan diskursus lainnya saling berkaitan (Fathoni, 2013).

Dalam kajiannya, baik secara teoretis maupun praktik, Greenblatt lebih fokus pada persoalan sejarah dan sastra. Perluasan disipliner yang meliputi kajian tekstualitas, bahasa, dan representasi pada dasarnya berbasis pada analisis historis; efek dari kritisisme sastra terhadap sejarah, yakni dengan membaca sejarah sebagai sebuah teks (Brannigan, 1998: 9). *New historicism* menempatkan teks sastra dalam kerangka teks nonsastra. Dokumen-dokumen sejarah tidak disubordinasikan sebagai konteks, melainkan dianalisis sebagai teks tersendiri dan disebut sebagai ko-teks, bukan konteks.

Teks dan ko-teks yang digunakan akan dilihat sebagai ekspresi dan tafsiran momen sejarah yang sama.

Ada tiga lapis prosedur kerja yang dapat dilakukan dalam upaya menjelaskan fenomena sejarah melalui teks (Barry, 2010: 204). Pertama, melalui ideologi, yakni satu fase akademis untuk membuka selubung ideologi yang berada di balik teks. Teks tidaklah hadir begitu saja. Sebagai konstruksi yang merekam peristiwa sejarah melalui jaringan bahasa yang dimilikinya, teks menampung dan merefleksikan ideologi yang melatarbelakanginya. Kedua, praktik diskursif terjadi pada masanya sendiri, yaitu upaya untuk menjelaskan praktik-praktik diskursivitas yang pernah terjadi. Melalui teks, praktik diskursif itu dapat dibaca, dibongkar, dan dijelaskan secara memadai. Ketiga, melalui praktik diskursif yang terjadi saat ini, yakni ketika teks itu sudah dalam pergulatan dan pertarungan wacana dalam konteks kekinian. Hanya melalui praktik diskursif, hal-hal substansial dan fundamental dalam dimensi kehidupan manusia itu dapat dinyatakan berhubungan dengan peristiwa historis masa lalu. Relasi antara teks sastra dan kenyataan sejarah dibangun sesuai dengan teks itu sendiri. Akan tetapi, teks kesusasteraan tidak dapat berhubungan simplistik dengan kenyataan sejarah. Relevansi antara realitas tekstual dan sejarah yang dirujuk, menempatkan ideologi dalam realitas sejarah sebagai kekuatan produksi.

Greenblatt (dalam Wiyatmi, 2012: 8) dan Gallagher (1999: 434) lebih memperhatikan *New Historicism* pada lima aspek, yakni 1) penggunaan anekdot, 2) penggunaan representasi, 3) tertarik dengan sejarah dari rangkaian atau gugusan, 4) memperhatikan pada hal-hal kecil yang diabaikan, dan 5) analisis ideologis secara skeptis. Dengan menekankan kaitan antara teks dan sejarah, Greenblatt (dalam Budianta, 2006) mendobrak kecenderungan kajian tekstual formalis dalam tradisi *new criticism* yang bersifat ahistoris, yang melihat sastra sebagai wilayah estetik yang otonom, dipisahkan dari aspek-aspek yang dianggap berada “di luar” karya tersebut. Sastra, menurut perspektif yang ditawarkan *New Historicism* tak bisa dilepaskan dari praksis-praksis sosial, ekonomi, dan politik karena ia ikut mengambil bagian di dalamnya.

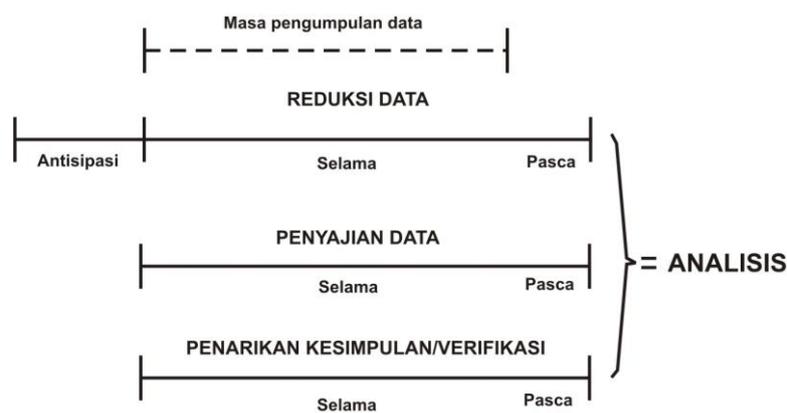
Dengan demikian, pemisahan antara luar-dalam, ekstrinsik-intrinsik tak bisa dipertahankan lagi karena semua teks, baik sastra maupun nonsastra merupakan produk dari zaman yang sama dengan berbagai pertarungan kuasa dan ideologi. Oleh sebab itu,

ada perbedaan antara *new criticism* yang hanya meneliti karya sastra dan *new historicism* mengaitkan antara teks sastra dan nonsastra. Dalam hal ini, *new historicism* merevisi asumsi *new criticism* dengan menunjukkan bahwa semua yang dianggap universal, tak terjamah waktu, natural bersifat lokal, terbentuk oleh sejarah, dan merupakan bentukan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data interaktif, yaitu pembacaan secara intensif dari fiksi (novel), pencatatan secara aktif dengan desain *content analysis*. Langkah kerja penelitian adalah (1) menentukan teks yang dipakai sebagai objek penelitian; (2) membaca novel dan sumber-sumber tertulis yang relevan; (3) menganalisis objek penelitian, dengan tahap pertama, mendaftarkan kutipan yang berkaitan dalam teks; kedua, menafsirkan teks untuk bisa memahami keseluruhan isinya. Teknik pengumpulan data berupa penelusuran dokumen.

Teknik analisis menggunakan model analisis interaktif dan berupa kegiatan yang bergerak terus pada ketiga alur kegiatan proses pengkajian. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Milles dan Huberman (2007: 19--20), terkait reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Untuk lebih jelasnya, proses analisis interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut.



Gambar 1 Skema Model Analisis Interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel *Larasati* karya Pramoedya Ananta Toer secara umum memaparkan realitas sejarah pada masa perang kemerdekaan, yaitu perjuangan untuk tetap menegakkan kemerdekaan. Dalam novel ini digambarkan situasi pergolakan revolusi Indonesia

pascaproklamasi yang tidak menentu akibat belum adanya kestabilan kekuasaan. Di satu sisi, secara *de jure* Indonesia merupakan bangsa yang telah merdeka, namun di sisi lain kekuasaan Belanda masih tetap bertahan. Bagi sebagian orang situasi semacam ini justru digunakan untuk mencari keuntungan pribadi, namun sebagian orang justru semakin terbakar semangat nasionalismenya.

Sebagai seorang *republieken*, Larasati rela terjun ke daerah pendudukan demi mengumpulkan informasi strategis, supaya Ia bisa menjadi pembawa Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai bentuk kepercayaan masyarakat prokemerdekaan bahwa negara yang baru masih tetap berdiri dan mandiri. Dalam kisah perjalanannya tersebut, Ara dihadapkan pada persoalan-persoalan perjuangan nasional di seputar revolusi kemerdekaan. Berikut ini disajikan temuan data realitas sejarah politik Indonesia pada masa perang kemerdekaan (1945–1949).

Tabel 1 Analisis Kerja Penelitian

Indikator	Halaman	Total
Struktur Ideologi	9, 12, 13, 22, 29, 30, 33, 46, 64, 86, 87, 113, 123, 130, 134, 137, 147, 152, 162, 168, 170	21
Praktik Diskursif	21, 22, 26, 27, 28, 35, 75, 76, 108, 110, 113, 121, 126, 134, 149, 170	16
	Jumlah	37

1. Struktur Ideologi Politik pada Kurun Waktu 1945—1949

Struktur ideologi dibangun untuk semakin mengukuhkan kekuatan berbasis negara. Negara dipersepsikan sebagai kekuatan yang semakin digdaya dalam melakukan kontrol terhadap warganya, tanpa terkecuali kontrolnya terhadap konstruksi ideologi. Althusser (dalam Barry, 2010) memberikan istilah itu untuk memberikan impresi yang lebih halus sebagai perangkat ideologi negara (*state ideological apparatuses*); termasuk dalam kelompok ini ialah partai politik, sekolah, lembaga sosial-kemasyarakatan/keagamaan/peribadatan, media, keluarga, dan perkumpulan seni (Barry, 2010: 192). Kelompok-kelompok itulah yang menjadi instrumen strategis bagi keberlangsungan negara untuk semakin meneguhkan jaring-jaring kuasanya.

“Main sandiwara?” Kolonel Inlander itu batuk-batuk kecil, tapi kemudian suaranya bernada ancaman, “Ah, tidak. Seorang *replubiken* tidak bisa bermain sandiwara dengan tepat.” (Toer, 2003: 29)

Kalimat dalam kutipan di atas terkesan seperti sedang memperolok Larasati yang terang-terangan menyatakan bahwa ia seorang *republikein*. Keberpihakan Kolonel Surjo kepada Belanda membuatnya memiliki cara berpikir dan cara pandang yang sama dengan Belanda (yang saat itu merasa masih menjajah Indonesia dan menganggap Indonesia belum ada). Menurut Hamid (2016: 42—58), penjajahan yang dilakukan bangsa asing (di Indonesia) bukan sekadar menguasai secara politik negara jajahannya, tetapi juga melibatkan penguasaan pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya pribumi. Indonesia waktu itu baru saja berdiri sebagai negara baru yang merdeka, tentu masih menata pemerintahannya, masih berpindah ibu kota di Yogyakarta, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta.

Gambaran bahwa sebuah negara dibangun atas dasar ideologi tertentu. Ideologi itulah yang selanjutnya menjadi kekuatan negara dalam rangka melakukan kontrol atau pengendalian terhadap jalannya negara secara efektif. Dalam konteks ideologi itu pula dibangun instrumen untuk mengefektifkan ideologi tersebut. Punggawa-punggawa kerajaan (negara) merupakan instrumen ideologis atau dalam istilah yang dinyatakan Althusser (dalam Barry, 2010: 193) disebut sebagai *state ideological apparatuses*. Punggawa negara macam Kolonel Surjo yang merasa kaki-tangan Belanda pun turut menyuarakan ideologi yang dianutnya, ideologi penjajah.

“Husy, kau tahu di mana monyet-monyet itu dikurung, pergi!” (Toer, 2003: 30)

“Buat apa? Buka semua! Cepat! Anjing-anjing Soekarno suka belagak goblok.” (Toer, 2003: 33)

Nanti juga—di bumi penjajahan. Bekasi yang bakal menentukan! Bekasi! Tapi biar bagaimanapun aku tidak akan berkhianat. Aku juga punya tanahair. Jelek-jelek tanah airku sendiri, bumi dan manusia yang menghidupi aku selama ini. Cuma binatang ikut Belanda (Toer, 2003: 13).

“Binatang! Anjing! Serigala!” ia menangis terisak-isak. “Apa guna memaki? Mereka memang anjing, mereka binatang,” Lasmidjah meneruskan (Toer, 2003: 113).

Kata ‘monyet-monyet’ dan ‘Anjing-anjing Soekarno’ yang dilontarkan oleh Kolonel Surjo tersebut ditujukan bagi para pejuang yang tertangkap dan dipenjarakan oleh Belanda. Dalam kalimat ini, Kolonel Surjo Sentono juga menunjukkan bahwa seorang *republikein* yang inferior tentu tidak dapat melakukan suatu hal yang benar berbeda dengan Bangsa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan. Aparatur negara itu (Kolonel Surjo) selanjutnya yang akan mengoperasionalkan ideologi itu pada tataran

praktis.

Berbeda dengan apa yang disebut oleh Kolonel Suryo Sentono yang memberi julukan bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia dengan istilah “monyet”, sebaliknya Larasati memberi sebutan kepada siapa pun yang berpihak kepada Belanda atau pro penjajah disebutkannya dengan istilah “binatang”.

Nama Suryo Sentono dalam novel *Larasati* merupakan pengejawentahan tokoh nyata, yaitu Suryo Santoso, seorang perwira NICA yang pada masa prakemerdekaan menjabat sebagai Letnan KNIL. Setelah merdeka, dia lebih memilih menjadi Belanda. Dia adalah perwira tertinggi berdarah “pribumi” yang pada novel ini bertugas di divisi artileri medan sekaligus kepala penjara “Jaga Monyet”.

“Bagus! Bagus sekali! Kolonel Drest menyambung sambil tertawa ramah. “En, bagaimana pendapat Kolonel Surjo Santoso?” Kolonel artileri itu menggeleng.

“Mengapa?”

“Apa peranan artileri kemudian?” kolonel *inlander* itu memprotes (Toer, 2003: 64).

Lebih lanjut, dampak ideologis yang beroperasi itu banyak berakibat pada disparitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sangat tajam. Sebagai balasannya, dapat dilihat pemikiran yang menolak ideologi Barat lewat Kolonel Surjo tersebut. Pramoedya pada akhirnya jatuh pada simpulan bahwa angkatan tua-lah yang sebetulnya menjadi biang kerok kehancuran zaman yang kemarin-kemarin itu dan hari ini.

“Seluruh kedudukan yang enak diambil orang-orang tua. Mereka hanya pandai korupsi.” (Toer, 2003: 22)

“Hanya angkatan tua yang korup dan mengajak korup! Angkatan muda membuat revolusi ” (Toer, 2003: 46).

Dia meninggal! Dia - Revolusi itu sendiri! Dan aku - aku sendiri telah patah dua di sini. Aku - Revolusi itu sendiri juga, seperti kata Chaidir. Apa nasibnya Revolusi kemudian? Chaidir mati. Chaidir anak kerempeng bermata merah itu (Toer, 2003: 147).

Chaidir adalah seorang penyair yang dulu pernah Ara temui di Yogya. Seorang seniman yang memiliki semangat untuk berjuang membantu revolusi dengan seni, namun banyak pemimpin yang meragukan dan mengecilkan peran seni dalam revolusi. Pertemuannya dengan Chaidir memengaruhi Ara dalam memandang dan memaknai revolusi. Revolusi membutuhkan segala-galanya, apa pun yang bisa diberikan oleh orang kepada revolusi harus diterima dan bukan untuk ditolak. Dalam pandangan Chaidir, jatuhnya Yogya ke tangan Belanda akibat dari para pemimpin yang angkuh dan gila hormat.

Ketika membaca nama tokoh “Chaidir” yang seorang seniman dan meninggal pada masa perang kemerdekaan dalam novel *Larasati* akan terbesit bahwa ‘nama’ tersebut memiliki kata yang *kognate* (istilah dalam linguistik kontrastif) dengan nama “Chairil Anwar”. Tokoh satu ini dikenal masyarakat Indonesia sebagai salah satu penyair terhebat yang pernah dimiliki Indonesia. Dia merupakan penyair angkatan '45. Pada 28 April 1949, Chairil meninggal dunia. Ada beberapa versi tentang sakitnya. Tapi yang pasti, TBC kronis dan sipilis dalam usia 27 tahun.

Media sebagai perangkat ideologi negara turut pula diungkap dalam novel ini. Media sebagai penyampai informasi pada khalayak ramai masih sangat terbatas pada masa ini, yaitu masih didominasi oleh surat kabar dan radio.

Di bawah koran Belanda itu tergelar harian *Fajar*, yang dikeluarkan oleh RVD (Jawatan Penerangan Pemerintah Belanda). Di sebuah pojok terdapat berita kecil “Penyair Chaidir Meninggal” dan di bawahnya “Bekas, Perdana Menteri ... berpidato pada upacara penguburannya.” (Toer, 2003: 152)

Dari berita koran, Ara mengetahui sahabat sesama senimannya telah meninggal, Chaidir. Dengan matinya Chaidir, baginya, mati pula revolusi itu sendiri. Selain itu, media memiliki peran berarti dalam memberi rasa berkecamuk bagi pendengarnya, dalam hal ini sebagian bangsa Indonesia yang memimpikan ingin merdeka sepenuhnya. Namun, berita di radio memberikan gambaran situasi yang gawat, Yogya jatuh. Yogyakarta adalah basis pertahanan terakhir bagi kubu Indonesia. Setelah Jakarta diduduki Sekutu dan Belanda, ibu kota berpindah ke Yogya, bersama presiden dan wakil beserta staf kementerian dan tentara nasional turut juga.

Berita-berita dari radio kian lama kian banyak menggambarkan tentang bentrokan-bentrokan bersenjata. Mula-mula di dekat Yogya, kemudian di sebelah baratnya. Dan makin lama makin banyak terjadi ke arah barat. Bila tempat-tempat bentrokan tersebut ditandai, dan diberi garis, akan nampak garis yang terus-menerus menuju ke arah barat dari Yogya menuju ke Jakarta (Toer, 2003: 162).

... Berita tentang kompromi antara revolusi dan kontra-revolusi akan melahirkan negara Indonesia Serikat... (Toer, 2003: 170).

2. Praktik Diskursif Politik Indonesia Kurun Waktu 1945—1949

Foucault mengkaji makna melalui sistem politik dan kekuasaan dalam praktik sosial, untuk sementara waktu distabilkan atau diregulasi dalam sebuah wacana (Barker, 2005: 105). Istilah wacana bagi Foucault 'menyatukan' bahasa dan praktik, yakni mengacu pada produksi pengetahuan melalui bahasa yang memberi makna pada benda-benda material dan praktik sosial. Dengan begitu, dunia dan praktik sosial itu dibentuk secara

diskursif. Wacana itu mengonstruksi, mendefinisikan, dan memproduksi objek-objek pengetahuan dengan cara yang dapat diterima nalar sekaligus menyingkirkan bentuk nalar yang kurang relevan. Menurut Barry (2010: 204), dalam seluruh proses jejaring *New Historicism* dapat dijelaskan melalui praktik diskursif, seperti halnya yang diwacanakan oleh para golongan muda versi novel *Larasati*.

“Kalau mati, dengan berani; kalau hidup dengan berani; kalau keberanian tidak ada, itulah sebabnya bangsa asing bisa jajah kita.” (Toer, 2003: 121)

Kau mesti belajar menjawab pekik Merdeka, Tobat, biarpun perlahan.” (Toer, 2003: 126)

Ideologi muda, pemimpin serdadu pemuda menyuarakan semangat kepada dirinya dan sesama pejuang lainnya untuk tetap memandang revolusi dan berani dalam menghadapi hidup (perang), perang terhadap agresi militer yang dilakukan Belanda. Selanjutnya, Ara sebagai seniman dan bintang film gagal memiliki harga diri dan bertahan dengan pandangan hidupnya bahwa hidup dan matinya akan diserahkan pada revolusi, pada kemerdekaan bangsa ini. Hal ini oleh Darmawati (2017: 42—63) disebut sebagai identitas kebangsaan, yaitu jati diri yang melekat pada suatu bangsa dan menandakannya sebagai sebuah bangsa. Identitas kebangsaan adalah ciri yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain sehingga setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas tersendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri, dan karakter dari bangsa tersebut. Dalam konteks sastra, karya sastra sarat dengan berbagai pedoman hidup, baik berupa petunjuk, ajaran maupun larangan atau pantangan.

“*Cuman* itu yang dapat aku perbuat. Nyawaku *toh* tidak bakal berharga bagi revolusi.” Mendengar itu mata posit itu bertepi-tepi. Mendesak, “Jadi kau tetap republikein. Tidak pernah niat masuk NICA (Nederlands-Indies Civil Administration)?” (Toer, 2003: 21)

Ia ingin menyusun sebuah repertoire sandiwara yang melukiskan kebesaran revolusi, dan ia ingin tunjukkan dirinya sendiri di tengah-tengah situasi revolusioner, sebagai tokoh dan juga sebagai api revolusi itu sendiri. Ia akan tokohkan pikiran-pikirannya dan perasaan-perasaannya. Ia akan menghukum pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa zaman revolusi itu, yang bercokol seperti feodal baru di atas pundaknya tubuh Revolusi, dan yang segera terbirit-birit apabila saatnya datang untuk menentukan sikap dan mengambil tindakan. (Toer, 2003: 148—149).

Ara ingin menulis kebenaran dalam sejarah. Sejarah versinya sendiri yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan istanasentris dan pewarisan sistem feodal yang selalu mengunggulkan pemerintah, bahwa pemerintah adalah selalu benar, kebijakan yang dicanangkan dan/atau dilancarkan selalu benar dan diakui secara luas oleh warga

negaranya. Apa yang menjadi pemikiran Ara tidak datang murni dari pemikiran dan perenungannya, tapi ada keterlibatan dari sudut pandang lain, dalam hal ini adalah persepsi dari kawan senimannya, Chaidir.

“Seluruh kedudukan yang enak diambil orang-orang tua. Mereka hanya pandai korupsi. Rencana-rencanaku kandas di laci-laci. Tapi kau tahu sendiri-itu semua di Yogya lebih banyak ku kira. Angkatan tua itu sungguh-sungguh bobrok!” (Toer, 2003: 22)

Chaidir yang juga mewakili golongan muda membuat hipotesis bahwa para golongan-golongan tua yang memegang kendali negara adalah para koruptor, penjual negara, pengkhianat, bahkan angkatan ‘bobrok’. Baginya, idealnya apabila menjadi seseorang yang mengaku bagian dari republik ini semestinya menjadi ‘republikin sejati’.

Ada sisi keadilan yang coba dikupas oleh Pramoedya bahwa golongan muda tidak selalu menjadi motor pada tegaknya revolusi, golongan tua pun terlibat secara langsung dan turun ke medan perang, tidak hanya melalui konferensi dan kesepakatan damai.

Seorang berusia tua di sampingnya memulai percakapan dengannya, “Kalau sampai di Jakarta-Nona ke Jakarta, bukan?- Jangan lupakan pemuda-pemuda ini. Mereka sedang melahirkan sejarah. Tak ada guna menghambatnya. Lebih baik membantu mereka.” (Toer, 2003: 26)

Dalam hati ia mengagumi si tua yang tak ketahuan nama, pekerjaan, dan pangkatnya. Mungkin seorang menteri. Mungkin seorang Inspektur Jenderal dalam pakaian preman. Secacat itu, tapi dia berjuang! (Toer, 2003: 27)

Orang tua yang cacat dan menurut Ara adalah seorang pejuang garis depan serta perwira militer berpengaruh, meskipun Ara tidak sempat mengenalnya. Begitu pun dalam narasi tidak dipaparkan secara eksplisit, Ara dalam deskripsinya menyimpulkan bahwa orang tua yang hanya berkaki sebelah ketika hendak turun dari kereta dipaparkan oleh dua orang muda berseragam kapten. Waktu turun dari gerbong, orang tua cacat itu disambut oleh satu saksi barisan kehormatan. Dengan tongkatnya orang tua itu memberi perintah kemudian masuk ke dalam sedan. Pada masa sesulit itu tentu saja yang memiliki kendaraan sedan adalah orang-orang terkemuka atau pejabat penting. Hal yang menjadi pemicu Ara dari orang tua itu adalah jangan lupakan pemuda-pemuda pejuang. Pemuda-pemuda tersebut sedang ‘melahirkan sejarah’. Golongan tua lainnya yang turut membawakan wacana mengenai perjuangan di masa itu adalah tokoh Ibu Ara (Lasmidjah), Kakek Mo, dan Nenek.

Mata tuanya kehilangan pelototannya. Kini berkaca-kaca sayu. Ia ciumi uang itu, tenggelam dalam gelombang perasaan berlebih-lebihan (Toer, 2003: 76).

Seperti kutipan di atas, ada kebanggaan dalam diri Kakek Mo dengan telah beredarnya ORI (Oeang Repoebliek Indonesia) yang menandakan bahwa negara baru tersebut masih berdiri karena mampu menerbitkan uang untuk alat tukar yang sah menggantikan uang Jepang atau uang Belanda.

Beberapa orang kakek dan nenek mengurusnya, membawanya ke Rumah Sakit Umum Pusat di Salemba (Toer, 2003: 108).

Keterlibatan golongan tua-tua dalam perjuangan di antaranya adalah dengan mengurus para serdadu republik yang terluka atau tewas dalam pertempuran. Mereka pun selalu tutup mulut ketika terjadi pengeledahan oleh pihak Belanda.

Seorang serdadu inlander yang mondar-mandir menjaga barisan nenek, kakek, wanita, dan kanak-kanak itu menghampiri Lasmidjah dan menempeleng mulutnya (Toer, 2003: 110).

“Ke mana Kakek Mo dan anak itu dibawa, Bu?...

“Keduanya tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Jangan tanya lagi.” (Toer, 2003: 113)

Tokoh-tokoh dari golongan tua yang pro republik seperti tokoh Lasmidjah, Nenek, dan Kakek Mo turut berjuang untuk tegaknya kemerdekaan yang telah diraih, untuk merdeka dengan sebenar-benarnya karena bagi mereka mempertahankan kemerdekaan merupakan kebenaran. Oleh sebab itu, wacana dalam upaya berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut sesuai dengan argumen Gallagher (1999: 434) bahwa dengan melalui praktik diskursif yang terjadi pada masanya sendiri, yaitu upaya untuk menjelaskan praktik-praktik diskursivitas yang pernah terjadi. Melalui teks, praktik diskursif itu dapat dibaca, dibongkar, dan dijelaskan secara memadai.

Seperti yang dikemukakan Foucault (1980: 133) bahwa kebenaran itu harus dipahami sebagai sistem prosedur yang teratur bagi produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan-pernyataan yang dihubungkan dengan relasi sirkular pada sistem-sistem kuasa yang menghasilkan dan mempertahankannya dan sekaligus dihubungkan dengan efek-efek kuasa yang dipengaruhinya. Selanjutnya, itulah yang disebut rezim kebenaran.

PENUTUP

Berdasarkan temuan data dan pembahasan di atas, berikut adalah simpulan dari hasil kajian yang telah dianalisis. Wujud realitas sejarah sosial politik Indonesia (kurun waktu 1945—1949) dalam novel *Larasati* karya Pramoedya Ananta Toer dengan menggunakan perspektif *New Historicism Greenblatt* dianggap efektif dalam menjelajah dan menyelami fenomena teks sastra. Hal tersebut terbukti dari kaitan novel secara langsung dengan manifestasi politik Indonesia yang mencakup: (1) struktur ideologi yang digunakan dan (2) praktik diskursif politik.

Struktur ideologi yang terdapat dalam novel *Larasati* meliputi keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian alam sekitarnya, di antaranya aparatur dan punggawa negara, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi sosial, pranata keluarga, dan kelompok seni. Nilai sosial budaya dalam struktur sosial terdiri atas ajaran agama, ideologi, dan kaidah serta aturan yang dimiliki suatu sistem masyarakat. Setiap satuan nilai memiliki tempat dan peranan tersendiri, demikian juga kelompok atau komponen sosial yang beragam.

Adapun praktik diskursif yang teridentifikasi meliputi konsep pengetahuan melalui bahasa yang memberi makna pada praktik sosial politik negara. Wacana yang dibangun pada subkajian ini lebih mengerucut sebagai suatu konsep perjuangan dan makna berjuang pada masa perang kemerdekaan bagi golongan muda dan golongan tua, baik yang pro kemerdekaan maupun pro penjajah. Persepsi tentang suatu objek, yaitu ‘berjuang’ dibentuk dengan praktik diskursif: dibatasi oleh pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang benar dan yang lain tidak; multi interpretasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Ramayda. (2015). "Subjektivitas Pramudya Ananta Toer dalam Novel Perburuan Kajian Psikoanalisis Historis Slavoj Zizek". Jentera, Volume 4, No. 1 (2015), p. 12—23.
- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang.
- Barry, Peter. (2010). *Beginning Theory: Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Brannigan, John. (1998). *New Historicism and Cultural Materialism*. London: Macmillan Press Ltd.
- Budianta, Melani. (2006). "Budaya, sejarah, dan pasar: New historicism dalam perkembangan kritik sastra". *Susastra, Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya*, 2 (3) 2006: 1-19.

- Carter, David. (2009). "Recent Trends" dalam *David Carter, Literary Theory* (Herts: Pocketessential, 2006), hlm. 133—140; terjemahkan oleh Indra Tjahyadi, "Membaca Tren Teori-Teori Sastra Mutakhir", *Majalah Seni dan Budaya*, Kidung, Edisi XVI, 2009.
- Darmawati, Besse. (2017). "Menggugah Identitas Kebangsaan Melalui Puisi", *Jentera*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2017, p. 42—63.
- Fathoni, Moh. (2013). "New Historicism Greenblatt: Identifikasi dan Relevansi dalam Kritik Sastra". Tersedia (artikel online). <http://katafath.wordpress.com>. October 4, 2013. diunduh pada Januari 2014.
- Foucault, Michel. (2006). *History of Madness*. New York: Routledge.
- Foucault, Michel.. (1980). *Power/Knowledge*. Suffolk: Harvester Press
- Gallagher, Catherine. (1999). *Marxisme and The New Historicism*. New York: New York University Press.
- Hamid, Rahimah A. (2016). "Sastra dan Penjajahan: Membaca Karya Pengarang Tersohor Indonesia dan Malaysia". *Jentera*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016, p. 42—58.
- Laksana, A.S. (1997). *Polemik Hadiah Magsaysay*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Mahayana, Maman S. (2005). *9 Jawaban Sastra Indonesia: Sebuah Orientasi Kritik*. Jakarta: Bening.
- Mills, Matthew B., dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Scholz, Bernhard F. (1990). "On Foucault's idea of an epistemic shift in the 17th century and its significance for Baroque scholarship", *Rijksuniversiteit, Utrecht, (Journal) LITERATOR*, Vol. 11 No, 3 November 1990, p.12—28.
- Taum, Yoseph Yapi. (2013). "Representasi Tragedi 1965: Kajian New Historicism atas Teks-Teks Sastra dan Nonsastra Tahun 1966 - 1998", *Ringkasan Disertasi*, Program Studi Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Toer, Pramoedya Ananta. (2003). *Larasati*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Wicaksono, Andri. (2016). "Kearifan pada Lingkungan Hidup dalam Novel-novel Karya Andrea Hirata (Tinjauan Strukturalisme Genetik) ". *Jentera*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, p. 7—21.
- Wiyatmi. (2012). "Representasi Sejarah Sosial Politik Indonesia dalam Novel-novel Karya Ayu Utami". *Laporan Penelitian*. FBS-UNY Yogyakarta, p. 1—44.